

Pengaruh Tenaga Kerja dan Belanja Pemerintah Daerah terhadap Perkembangan Sektor Pertanian di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat

Baghas Budi Wicaksono

Manajemen, Universitas Buddhi Dharma, Kota Tangerang, 15115
baghas.budi@ubd.ac.id

Abstrak— Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi sangat besar pada sub-sektor hortikultura dan tanaman pangan. Adapun beberapa latar belakang yang berkaitan dengan isu pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Cianjur yaitu, Kabupaten Cianjur memiliki kontribusi sebesar 37% untuk produksi tanaman pangan palawija dan hortikultura bagi kebutuhan pangan di Jawa Barat, Masih luasnya lahan yang dapat difungsikan menjadikan media pertanian untuk komoditas tanaman pangan, serta topologi dan karakteristik tanah yang subur mengakibatkan produktivitas panen tanaman pangan mengalami peningkatan secara signifikan. Adapun penelitian ini menggunakan data sekunder kuantitatif yang menggunakan proksi variabel jumlah tenaga kerja sektor pertanian, belanja pemerintah daerah urusan pilihan (pertanian) serta produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian membuktikan variabel tenaga kerja sektor pertanian dan belanja pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Cianjur dengan *p-value* dibawah 0,05. Model regresi juga menunjukkan bahwa data penelitian terlepas dari masalah asumsi klasik dengan kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimation*) yakni, terdistribusi normal, homoskedastisitas, non-multikolinieritas, serta non-autokorelasi. Hal ini mengindikasikan bahwa dua faktor produksi tersebut merupakan hal yang vital bagi pengembangan sektor pertanian, khususnya di daerah penghasil tanaman pangan terbesar di Jawa Barat.

Kata Kunci— Belanja Pemerintah, OLS, Produktivitas Pertanian, Sosial Ekonomi, Tenaga Kerja

I. PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi di pulau Jawa Indonesia yang memiliki beberapa keunggulan secara demografis dan ekonomi selama beberapa dekade terakhir. Hal ini diindikasikan oleh rata-rata pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat yang berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi 33 provinsi di Indonesia, yakni sebesar 5,7%. Adapun Provinsi Jawa Barat berpenduduk 49,94 juta jiwa yang didominasi 70,68% usia produktif menjadikan Jawa Barat menyandang predikat salah satu provinsi yang menikmati

bonus demografi lebih awal dibanding provinsi lainnya. Beberapa fakta pendukung tersebut seharusnya dapat membuat Provinsi Jawa Barat lepas dari berbagai isu ekonomi regional seperti meningkatnya angka pengangguran, ketimpangan pendapatan, serta rasio gini yang semakin memburuk. Namun dari segi perekonomian secara riil, Jawa Barat belum mampu untuk menciptakan ekonomi secara inklusif yang dapat mensejahterakan seluruh masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perekonomian Provinsi Jawa Barat hanya didukung oleh dua sektor vital yakni industri pengolahan / manufaktur sebesar 45% serta pertanian dengan kontribusi sebanyak 39% dan sisanya disumbang oleh sektor riil lainnya.

Jika ditinjau berdasarkan data pada penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa terjadi eskalasi produktivitas sektor pertanian sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 namun mengalami tren penurunan pada tahun 2017. Rata-rata produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Cianjur yakni sebesar 7,4 miliar rupiah. Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat bahwa terjadi tren penurunan tenaga kerja pada sektor pertanian di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat sejak 2012 hingga 2017. Hal ini didukung oleh fakta empiris bahwa nilai tukar petani yang semakin rendah mengakibatkan tenaga kerja sektor pertanian kurang memiliki insentif untuk tetap bertahan dan berkiprah di sektor pertanian sebagai pengelola lahan ataupun petani (Royda and Melvani, 2016). Pemerintah harus mengambil langkah progresif untuk menjaga keberlangsungan sektor pertanian demi ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Jawa Barat yakni dengan cara : membuka lapangan pekerjaan sektor pertanian baik bermitra dengan swasta atau melalui rekrutmen pegawai BUMN sektor pertanian dan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil bidang pertanian, memberikan insentif yang layak bagi petani berupa barang dan jasa, modal, serta bantuan likuiditas, meminimalisir alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan sektor ekonomi non-pertanian seperti industri ataupun jasa, serta membuat regulasi atau peraturan mengenai pengembangan pertanian di wilayah-wilayah yang memiliki potensi sektor pertanian tinggi secara inklusif baik bagi petani ataupun masyarakat secara umum (Ogboru et al., 2018). Selain pentingnya faktor produksi tenaga kerja pertanian, belanja pemerintah daerah pada urusan pertanian juga menjadi isu dalam peningkatan produktivitas pertanian.

Dapat diketahui bahwa setiap tahun belanja pemerintah daerah urusan pertanian di Kabupaten Cianjur mengalami penurunan rata-rata sebesar 45,6%. Pengembangan sektor pertanian tidak terlepas dari dukungan kebijakan fiskal sektor riil yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dan daerah. maka dari itu, Pemangku kebijakan perlu menyelaraskan pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata dengan memprioritaskan sektor pertanian sebagai media utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi (Chandio et al., 2016).

Jika ditinjau berdasarkan belanja pemerintah sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan produktivitas ekonomi sektor riil, adapun beberapa tinjauan yuridisnya yakni Belanja Daerah berdasarkan Permendagri pasal 31 No. 13 Tahun 2006 bahwa belanja daerah dapat dipakai untuk pembiayaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kota/Kabupaten yang terdiri dari urusan pilihan dan urusan wajib. Adapun pembagian belanja daerah diklasifikasi ke dalam dua jenis, yaitu belanja urusan wajib menurut Peraturan Menteri dalam Negeri nomer 13 Tahun 2006 pasal 32 ada 20 fungsi belanja urusan wajib yaitu kesehatan, perumahan rakyat dan pekerjaan umum, penataan ruang, catatan sipil, UKM, pemuda olahraga, serta sosial dan tenaga kerja. Belanja urusan pilihan menurut pasal 24 pada Permendagri nomer 13 tahun 2006, komponen belanja urusan pilihan yakni adalah perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, kelautan, energi dan sumber daya mineral serta perdagangan. Adapun berdasarkan pasal 24 pada Permendagri Nomer 13 Tahun 2006, ada beberapa variabel yang muncul dalam masing-masing belanja urusan pilihan dan urusan wajib yaitu : pertanian, perikanan, pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.

Adapun belanja langsung menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 36 ayat 2, belanja langsung memiliki komponen, yakni : (1) Belanja Modal, (2) Belanja barang dan jasa, (3) Belanja Pegawai. Belanja tidak langsung menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 36 ayat 2, belanja tidak langsung memiliki komponen, yaitu : Belanja keuangan, subsidi, bantuan sosial kepada masyarakat, tidak terduga dan hibah / unilateral.

Dari beberapa data pendahuluan, dapat diketahui bahwa isu yang terjadi pada pertanian di Kabupaten Cianjur yakni semakin menurunnya jumlah tenaga kerja sektor pertanian dan produktivitas pertanian. Berdasarkan fenomena ini jika ditinjau pada penelitian sebelumnya terjadi beberapa penyebab, yakni terjadi perubahan struktur ekonomi sejak pembangunan di era Presiden Soeharto dengan prioritas pengembangan sektor pertanian untuk kemandirian pangan yang digantikan dengan industrialisasi manufaktur serta energi. Perubahan struktur ekonomi seperti ini akan mengubah serapan tenaga kerja pada sektor pertanian secara lebih signifikan maka rumah tangga konsumen sebagai penghasil faktor produksi tenaga kerja akan memilih alternatif lain untuk dapat mendapatkan pekerjaan (Aina & Omojola, 2017) . Pada penelitian yang dilakukan oleh Yuan (2015) memaparkan bahwa kebijakan fiskal dalam hal pengeluaran pemerintah juga memiliki peranan penting dalam memajukan sektor riil di Indonesia, salah satunya adalah pengeluaran pemerintah daerah dalam urusan pertanian. Secara empiris, terjadi peningkatan belanja pemerintah pada sektor pertanian namun produktivitas pertanian mengalami penurunan di beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan pentingnya untuk mengetahui penyebab produktivitas pertanian menurun ditinjau dari faktor produksi asli yakni tenaga kerja dan modal. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan melalui data pendahuluan, peneliti tertarik untuk mengidentifikasi pengaruh faktor produksi tenaga kerja dan belanja pemerintah daerah urusan pertanian terhadap produktivitas pertanian di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.

II. METODOLOGI

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari instansi pemerintah yang relevan yakni seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJPB Kemenkeu RI) selama tahun 2010 hingga tahun 2017 dengan lingkup penelitian di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Data dalam penelitian ini juga didapatkan dari tinjauan pustaka berupa *literature review*, tulisan ilmiah maupun artikel yang berkaitan dengan topik pengembangan produktivitas sektor pertanian.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengolah data sekunder melalui statistik deskriptif dan statistik inferensial. Secara teoritis, model penelitian ini merupakan model teori produksi *Cobb-Douglass* yang mendefinisikan bahwa produksi adalah proses transformasi dari beberapa faktor produksi / input produksi menjadi barang dan jasa. Menurut (Mankiw, 2022), produksi merupakan salah satu aktivitas produsen dalam perusahaan dengan proses pengolahan beberapa input. Analisis pengaruh masukan / input terhadap keluaran/output produksi dideskripsikan dalam fungsi produksi. Adapun fungsi produksi yang secara umum

digunakan dalam analisis sektor riil adalah *Cobb-Douglas*. Menurut (Mankiw, 2022), Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah suatu fungsi matematis yang menggambarkan hubungan antara masukan/input yang digunakan untuk menghasilkan produk barang/jasa dengan jumlah tertentu. Untuk ilustrasi antara output dan input. Secara matematika, fungsi ini dapat dijelaskan dalam persamaan (1)

$$Q = A L^{\alpha} K^{\beta} \quad (1)$$

Keterangan (1):

Q = *Quantity of Output* / Barang dan Jasa

L = *Labour* / Tenaga Kerja

K = *Capital* / Modal

Nilai α dan nilai β pada fungsi produksi menunjukkan elastisitas faktor produksi (L dan K). Sehingga, jumlah dari derajat kepekaan / sensitivitas faktor produksi dapat menggambarkan tambahan produksi dengan syarat tertentu.

1. Jika $\alpha + \beta > 1$, maka terdapat tambahan produksi yang meningkat karena perubahan produksi, (*Increasing return to scale*).
2. Jika $\alpha + \beta = 1$, maka terdapat tambahan produksi yang konstan karena perubahan produksi, (*Constant return to scale*)
3. Jika $\alpha + \beta < 1$, maka terdapat tambahan produksi menurun karena perubahan produksi, (*Decreasing return to scale*).

Adapun model regresi (2) yang digunakan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Masru et al. (2018), Octaviani dan Juliprijanto (2021), Usman (2018) serta Yuan (2015) mengenai pengaruh tenaga kerja sektor pertanian dan belanja pemerintah daerah urusan pertanian terhadap produktivitas sektor pertanian yakni dalam persamaan (2).

$$\text{Prod_Tani}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Taker}_{it} + \beta_2 \text{XPND}_{it} + u_{it} \quad (2)$$

Keterangan (2) :

Prod_Tani : Produktivitas sektor pertanian (output per tenaga kerja)

Taker : Tenaga kerja sektor pertanian

XPND : Belanja pemerintah daerah urusan pertanian

C. Sumber Data

Data yang dipakai dalam model penelitian ini didapatkan dari lembaga pemerintah yang relevan seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian RI, serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. Peneliti menggunakan data sekunder dikarenakan beberapa alasan, yakni : (1) data sekunder lebih aktual dalam menggambarkan pengaruh variabel yang diteliti, (2) data sekunder lebih mudah diperoleh secara daring, (3) data sekunder mengenai variabel yang

diteliti sangat lengkap dan kredibel karena dirilis oleh instansi resmi pemerintah masing-masing.

D. Teknik Pengolahan Data

Peneliti menggunakan model regresi linier berganda dengan dua variabel bebas yakni tenaga kerja dan belanja pemerintah daerah serta satu variabel terikat yaitu Produktivitas sektor pertanian. Regresi yang dilakukan dilengkapi dengan beberapa uji statistik, yakni : uji asumsi klasik yang terdiri dari uji autokorelasi, heteroskedastisitas, distribusi normal dan uji multikolinieritas. Selain itu, uji Hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji-t dan secara simultan atau bersama-sama yakni dengan menggunakan uji-F (Usman, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menampilkan model penelitian yang sudah dirumuskan, dapat dianalisis dengan tabel hasil regresi.

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Regresi linier berganda

Variabel	Equation		
	Coefficient	t-statistic	Prob.
C	0.5965	4.37	0.007
TK	0.018	4.73	0.051
BJ_PD	0.049	2.77	0.04
R-Squared		0.7611	
F-statistic		7.96	
Prob (F-statistic)		0.0279	

A. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Produktivitas Sektor Pertanian di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1, hasil regresi dapat diketahui bahwa tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap produktivitas sektor pertanian dengan koefisien regresi sebesar 0.018. Artinya jika variabel tenaga kerja memiliki peningkatan output sebesar 1 % maka, produktivitas akan meningkat sebesar 0,018 atau sebesar 1,8 %. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Rompas et al., (2015), Yakub et al., (2021), Marlin et al., (2015), dan Takashima (2020) mengenai pengaruh tenaga kerja terhadap produktivitas pertanian. Adapun pengaruh signifikan juga diindikasikan dari t-statistik sebesar 4.73 dengan *p-value* < 0,05.

B. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Produktivitas Sektor Pertanian di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil regresi pada Bab tiga diperoleh hasil regresi yang menunjukkan bahwa belanja

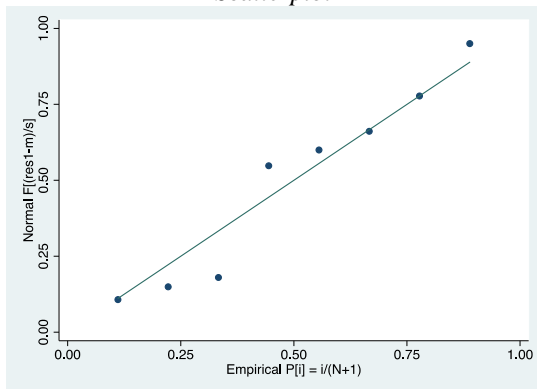
pemerintah daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produktivitas pertanian dengan koefisien sebesar 0,04. Artinya jika variabel belanja pemerintah daerah urusan pertanian meningkat sebesar 1%, maka produktivitas pertanian akan meningkat sebesar 0,04 atau 4%. Hal ini relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masru et al., (2018), Ebenezer et al., 2019) dan Kristiana (2015) serta Suwardi (2015) mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap pembangunan pertanian. Pengaruh signifikan diketahui berdasarkan t-statistik variabel belanja pemerintah daerah sebesar 2.77 dengan $p\text{-value} < 0,05$.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Distribusi Normal

Gambar 1 menampilkan merupakan model regresi yang sudah di interpretasikan harus memiliki distribusi data yang relevan dengan kaidah statistika, yaitu berdistribusi secara normal. Adapun uji normalitas yang digunakan yakni menggunakan *scatterplot*.

Gambar 1. Uji Normalitas menggunakan Grafik *Scatterplot*



Jika ditinjau berdasarkan gambar 1, dapat diketahui bahwa data pada model regresi memiliki tren linier disepanjang garis yang melintang. Hal ini mengindikasikan data berdistribusi secara normal dan simetris (Pakapon, 2017).

2. Uji Multikolinieritas

Tabel dua mengilustrasikan merupakan interpretasi uji multikolinieritas atas model regresi yang sudah dilakukan. Adapun tujuan dari uji ini yakni untuk mengetahui pola hubungan antara variabel bebas yaitu tenaga kerja sektor pertanian dan belanja pemerintah daerah urusan pertanian.

Tabel 2. Uji Multikolinieritas dengan metode *Variance Inflation Factor*

Variabel	VIF
Tenaga Kerja	3.3
Belanja Pemerintah Daerah	3.3

Berdasarkan uji multikolinieritas dengan metode VIF pada tabel dua, dapat diketahui bahwa dua variabel bebas terlepas dari masalah heteroskedastisitas karena nilai VIF < 5 . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antar variabel bebas yakni tenaga kerja dan belanja pemerintah daerah. Adapun tabel tiga mengilustrasikan uji heteroskedastisitas pada model regresi. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah varians yang ada konsisten atau tidak. Sebagaimana diilustrasikan dalam tabel 3.

3. Uji Heteroskedastisitas

Adapun tabel 3 menunjukkan kecenderungan heteroskedastisitas pada variabel bebas yang diteliti, yaitu kecenderungan varians dari setiap residual yang tidak konsisten dalam setiap observasi.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser

Variabel	p-value
Tenaga Kerja	0.849
Belanja Pemerintah Daerah	0.774

Berdasarkan tabel 3 mengenai uji heteroskedastisitas, dapat diketahui bahwa nilai $p\text{-value}$ dari variabel bebas $> 0,05$ yang menandakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain regresi penelitian ini bersifat homoskedastisitas yakni dalam model regresi tidak terjadi inkonsistensi varians dari berbagai residual.

4. Uji Autokorelasi

Diketahui berdasarkan hasil *runtest* untuk uji autokorelasi memiliki $p\text{-value}$ diatas 0,05 yakni sebesar 1. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak memiliki hubungan sebab akibat antar *error term* atau residual pada antar periode t dengan periode $t-1$ (sebelumnya).

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil pengolahan data model regresi linier berganda, diketahui bahwa koefisien determinasi pada persamaan bernilai 0.7611 yang memiliki arti bahwa sebanyak 76% variasi perubahan produktivitas pertanian dipengaruhi oleh variabel tenaga kerja dan belanja pemerintah daerah, sedangkan sebanyak sisa 24% memiliki makna bahwa variabel produktivitas pertanian dijelaskan oleh variabel bebas lain diluar model yang diteliti.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan model regresi linier berganda pada persamaan satu dan dua, maka dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tenaga kerja dan belanja pemerintah

daerah urusan pertanian terhadap produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Cianjur selama tahun 2010 hingga tahun 2017. Model regresi yang digunakan terbukti memiliki *goodness of fit* karena telah lolos dari semua uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Menurut (Shanmugan & Baria, 2019), tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas pertanian dikarenakan produksi komoditas pertanian di Kabupaten Cianjur masih bersifat padat karya yang memiliki karakteristik produksi tradisional, jam kerja tidak menentu, musiman, serta rawan untuk gagal panen karena mengandalkan sawah tadah hujan atau non-irigasi (Carson, 2018). Beberapa hal tersebut membuat penurunan partisipasi tenaga kerja terhadap output pertanian akan semakin besar, terlebih lagi belum terlalu banyak industri pertanian melalui investasi sektor swasta yang mengolah komoditas pertanian di Kabupaten Cianjur (Suphannachart, 2017). Selain itu, belanja pemerintah pertanian juga menjadi penting jika mengingat program pemerintah di wilayah Jawa Barat berfokus pada pengembangan sektor pertanian. Rasio belanja pemerintah pertanian terhadap total APBD akan berdampak besar bagi peningkatan produktivitas pertanian, terlebih lagi jika dialokasikan dalam belanja barang dan jasa seperti pengadaan pupuk, *fertilizer*, benih, traktor, dan lain-lain (Bhushan, 2021). Belanja pertanian yang besar juga akan meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia seperti aparatur sipil negara, petani, pelaku usaha di bidang pertanian secara riil. Maka, diharapkan pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Barat dapat memperhatikan daerah potensial dengan baik dan benar dalam hal kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah dalam sektor pertanian.

Adapun beberapa saran yang relevan bagi penelitian selanjutnya, dapat menggunakan data panel dengan beberapa kabupaten/kota pada tahun penelitian yang lebih panjang untuk mengetahui perbedaan pengaruh faktor produksi pertanian antar daerah di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah dan akademisi harus bisa mensinergikan kebijakan pengembangan sektor pertanian di Provinsi Jawa Barat yang didasari atas temuan penelitian terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aina, G. O. &, & Omojola, J. T. (2017). *Assessment of the Effect of Government Expenditure on Agricultural Output in Nigeria (1980-2013)*. www.seahipaj.org
- Bhushan, S. (2021). Labour Productivity Dynamics in Indian Agriculture: 2000–2016. *Indian Journal of Labour Economics*, 64(2), 371–388. <https://doi.org/10.1007/s41027-021-00318-w>
- Carson, K. I. (2018). Agricultural training and the labour productivity challenge. *International Journal of Agricultural Management*, 6(3–4), 131–133. <https://doi.org/10.5836/ijam/2017-06-131>
- Chandio, A. A., Jiang, Y., Rehman, A., Jingdong, L., & Dean, D. (2016). Impact of Government Expenditure on Agricultural Sector and Economic Growth in Pakistan. *International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR)*, 7(3), 1046–1053. <http://www.bipublication.com>
- Ebenezer, M., Ngarava, S., Etim, N.-A., & Popoola, O. (2019). Impact of Government Expenditure on Agricultural Productivity in South Africa. *The Journal of Social Sciences Research*, 512, 1734–1742. <https://doi.org/10.32861/jssr.512.1734.1742>
- Mankiw, G. *Macroeconomics* (2022). McGraw Hill Publisher
- Marlin, H., Universitas, A., Artha, K., & Kupang, W. (2015). Pengaruh Belanja Langsung Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pertanian Terhadap IPM (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Propinsi NTT). In *WAHANA* (Vol. 18, Issue 2).
- Masru, D., dan Ady Soejoto Fakultas Ekonomi, ah, Negeri Surabaya, U., & Ketintang Surabaya Jl Ketintang Surabaya, K. (2018a). *Pengaruh Tenaga Kerja dan Investasi di Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan sektor Pertanian di Provinsi Jawa Timur*.
- Masru, D., dan Ady Soejoto Fakultas Ekonomi, ah, Negeri Surabaya, U., & Ketintang Surabaya Jl Ketintang Surabaya, K. (2018b). *Pengaruh Tenaga Kerja dan Investasi di Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan sektor Pertanian di Provinsi Jawa Timur*.
- Octaviani, D., & Juliprijanto, W. (2021). *Analysis of The Effect of Agriculture Sector Towards Employment Absorption in Central Java (2010-2019)* (Vol. 2, Issue 1).
- Ogboru, I., Abdulmalik, F. A., & Park, I. O. (2018). Licensed under Creative Common Government Expenditure on Agriculture and Its Impact on Unemployment Reduction in Nigeria : 1999 - 2015. In *International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom: Vol. VI*. <http://ijecm.co.uk/>
- Puspita Kristiana, Y., & Central Asia, B. (2015). Economics Development Analysis Journal Analisis Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Kebijakan RENSTRA Terhadap PDRB Sektor Pertanian. *EDAJ*, 4(4). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Rompas, J., Engka Dan, D., Tolosang, K., Ilmu, J., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2020). *Potensi Sektor Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Minahasa Selatan*.
- Royda, P., & Melvani, F. N. (2018). *Pengaruh Belanja Pemerintah untuk Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Serta Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan*.
- Settsu, T., & Takashima, M. (2020). Labour Productivity Growth in The Long Run : Japan, 1606-1909. *Australian Economic History Review*, 60(1), 5–26. <https://doi.org/10.1111/aehr.12188>

- Shanmugan, K., & Baria, B. P. (2019). Agricultural Labour Productivity and Its Determinants in India. *Indian Journal of Labour Economics*, 62(3), 431–449. <https://doi.org/10.1007/s41027-019-00180-x>
- Suphannachart, W. (2017). What Drives Labour Productivity in the Ageing Agriculture of Thailand? In *Advances in Management & Applied Economics* (Vol. 7, Issue 1). online) Scienpress Ltd.
- Suwardi, A. (2011). Pengeluaran Pemerintah Daerah, Produktivitas Pertanian, dan Kemiskinan di Indonesia Local Government Spending, Agricultural Productivity and Poverty in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 12(1), 39–55.
- Usman, U. (2018). Pengaruh Luas Lahan, Pupuk, dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Produksi Padi Gampong Matang Baloi. In *Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal* (Vol. 01).
- Yakub, Y., Siti, S., & Khotijah, A. (2021). Penerapan Anggaran Belanja Terhadap Kinerja Operasional di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. 2(2), 205–220. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jafta>
- Yuan, Y., & Domai, T. (2017). Analisis Belanja Daerah Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Dan Kinerja Sektor Pertanian Di Kota Malang. 17(4).